

**TAJUK RENCANA PADANG EKSPRES PADA PEMILU 2004 DAN 2009
DI MASA REFORMASI**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan
Pada Program Studi Pendidikan Sejarah
Universitas Negeri Padang*



**Oleh :
ALBERT SUWANDI
2005/64967**

**JURUSAN SEJARAH
FAKULTAS ILMU ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2012**

KATA PENGANTAR



Syukur alhamdulillah Penulis haturkan kehadiran Allah SWT atas segala Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga Penulis dapat merampungkan skripsi yang berjudul **“Tajuk Rencana Padang Ekspres Pada Pemilu 2004 Dan 2009 Di Masa Reformasi”**. Skripsi ini merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan Program Strata Satu (S1), Jurusan Sejarah pada Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Hendra Naldi, SS, M.Hum selaku Pembimbing I dan Bapak Eka Vidya Putra, S.Sos, M.Si selaku Pembimbing II yang telah memberikan ilmu, pengetahuan, waktu, dan bimbingan serta masukan yang sangat berharga bagi Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Selain itu Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang secara langsung telah mendorong penulis untuk menyelesaikan studi dan skripsi ini. Pada kesempatan ini, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dekan dan Pembantu Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang yang telah memberikan fasilitas-fasilitas dan izin dalam penyelesaian skripsi ini.
2. Bapak Ketua dan Sekretaris Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang yang telah memberikan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.

3. Bapak Drs. Zul Asri, M.Hum, Bapak Drs. Etmi Hardi, M.Hum. Bapak Abdul Salam, S.Ag, M.Hum sebagai tim penguji yang telah meluangkan waktu dan pikiran untuk kesempurnaan penulisan skripsi ini.
4. Bapak dan Ibu Staf Pengajar Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang serta karyawan yang telah membantu penulis selama menuntut ilmu di kampus ini.
5. Pimpinan beserta jajaran pengurus dan para wartawan Harian Padang Ekspres yang telah membantu Penulis dalam melakukan penelitian dan memberikan data dalam penelitian ini.
6. Teristimewa untuk kedua orang tuaku yang sangat ku cintai yakni Ayahku Suwandi dan Ibuku Rita Warni yang telah memberikan dukungan moril dan materil untuk keberhasilan penulis. Untuk kakakku, kakak iparku, adik-adikku dan keponakanku (sumber semangatku) yang telah memberikan perhatian dan kasih sayang sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan penulisan skripsi ini.
7. Sahabat-sahabatku khususnya warga X6 Tim-tim yang telah memberikan dukungan dan selalu ada disaat suka dan duka.
8. Teman-teman mahasiswa angkatan 2005 dan para Junior pada Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang serta rekan-rekan yang sama-sama berjuang atas motivasi, saran, dan informasi yang sangat berguna.
9. Serta semua pihak yang telah membantu dalam proses perkuliahan yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Dengan pengetahuan serba terbatas penulis berusaha menyajikan skripsi ini walaupun dapat dikatakan jauh dari sempurna. Untuk itu saran dan kritik yang membangun penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Padang, Maret 2012

Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR ISTILAH	viii
DAFTAR LAMPIRAN	x
DAFTAR SINGKATAN	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Perumusan dan Pembatasan Masalah.....	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
D. Tinjauan Pustaka	6
E. Metode Penelitian.....	16
F. Sistematika Penulisan.....	19

BAB II PERS DI SUMATERA BARAT ERA ORDE BARU DAN PASCA

REFORMASI

A. Pers Sumatera Barat Era Orde Baru (1966-1998)	21
B. Pers Sumatera Barat Pasca Reformasi (1998-2003).....	27
C. Awal Kelahiran Padang Ekspres dan Kaitannya dengan Kelompok Jawa Pos	33

BAB III PEMBERITAAN PADANG EKSPRES PADA PEMILU TAHUN

2004 DAN 2009

A. Pemberitaan Tajuk Rencana Harian Padang Ekspres pada Pemilu Tahun 2004.....	43
B. Pemberitaan Tajuk Rencana Harian Padang Ekspres pada Pemilu Tahun 2009.....	56
C. Perbandingan Pemberitaan Harian Padang Ekspres pada Pelaksanaan Pemilu Tahun 2004 dan 2009.	69

BAB IV KESIMPULAN

Kesimpulan	72
------------------	----

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
2.1 Media Cetak Yang Terbit di Sumatera Barat Tahun 1999-2003.....	30
2.2 Perkembangan Tiras Padang Ekspres Tahun 1999-2003.....	39
3.1 Framing Tajuk Rencana Harian Padang Ekspres Edisi 15 Maret 2004	47
3.2 Framing Tajuk Rencana Harian Padang Ekspres Edisi 18 maret 2004.... ..	49
3.3 Framing Tajuk Rencana Harian Padang Ekspres Edisi 22 Maret 2004	50
3.4 Framing Tajuk Rencana Harian Padang Ekspres Edisi 25 Maret 2004	52
3.5 Framing Tajuk Rencana Harian Padang Ekspres Edisi 30 Maret 2004.. ..	53
3.6 Sikap Padang Ekspres Terhadap Kegiatan Pemilu Dan Kampanye Pemilu Tahun 2004	55
3.7 Framing Tajuk Rencana Harian Padang Ekspres Edisi 9 Januari 2009.	60
3.8 Framing Tajuk Rencana Harian Padang Ekspres Edisi 15 Januari 2009.	61
3.9 Framing Tajuk Rencana Harian Padang Ekspres Edisi 21 Januari 2009.	63
3.10 Framing Tajuk Rencana Harian Padang Ekspres Edisi 27 Januari 2009	64
3.11 Framing Tajuk Rencana Harian Padang Ekspres Edisi 9 Februari 2009.	66
3.12 Framing Tajuk Rencana Harian Padang Ekspres Edisi 6 Juli 2009.	67
3.13 Sikap Padang Ekspres Terhadap Kegiatan Pemilu Dan Kampanye Pemilu Tahun 2009.	68

DAFTAR ISTILAH

Breidel	:	Tindakan Pemerintah untuk melarang mencetak, menerbitkan dan mengedarkan penerbitan pers karena alasan politik.
Cross check	:	Uji silang dua pendapat berbeda tentang satu konsep permasalahan yang sama.
Harian	:	Penerbitan pers yang terbit setiap hari.
Head Line	:	Topik utama dalam pemberitaan surat kabar.
Independen	:	Bebas tanpa tekanan dari pihak manapun.
Jurnalis	:	Peliput berita atau orang-orang yang bekerja dibidang di jurnalistik.
Jurnalistik	:	Kegiatan dalam komunikasi yang dilakukan dengan cara menyiarkan berita, ulasan mengenai berbagai peristiwa.
Komoditi	:	Barang dagangan
Pers	:	Lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyimpan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.

Pers lokal	:	Surat kabar yang terbit di daerah tertentu dan kantor pusat berlokasi di daerah tersebut.
Pers nasional	:	Surat kabar yang terbit dalam skala nasional dan kantor pusat berlokasi di ibukota negara.
Taipan	:	Pengusaha besar dan kaya.
Tajuk Rencana	:	Pandangan redaksi terhadap masalah yang sedang hangat dibicarakan.
Tiras	:	Jumlah eksemplar surat kabar atau majalah yang diproduksi tiap hari.
Wartawan	:	Orang yang bertugas mencari dan mengolah informasi.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Tajuk Rencana Harian Padang Ekspres Edisi 15 Maret 2004.....	74
2. Tajuk Rencana Harian Padang Ekspres Edisi 18 maret 2004.....	75
3. Tajuk Rencana Harian Padang Ekspres Edisi 22 Maret 2004.....	76
4. Tajuk Rencana Harian Padang Ekspres Edisi 25 Maret 2004.....	77
5. Tajuk Rencana Harian Padang Ekspres Edisi 30 Maret 2004.....	78
6. Tajuk Rencana Harian Padang Ekspres Edisi 9 Januari 2009.....	79
7. Tajuk Rencana Harian Padang Ekspres Edisi 15 Januari 2009.....	80
8. Tajuk Rencana Harian Padang Ekspres Edisi 21 Januari 2009.....	81
9. Tajuk Rencana Harian Padang Ekspres Edisi 27 Januari 2009.....	82
10. Tajuk Rencana Harian Padang Ekspres Edisi 9 Februari 2009.....	83
11. Tajuk Rencana Harian Padang Ekspres Edisi 6 Juli 2009.....	84
12. Data Informan.....	85
13. Struktur Organisasi Harian Padang Ekspres.....	87
14. Tahapan Produksi Harian Padang Ekspres.....	88
15. Jajaran Pengelola Harian Padang Ekspres Tahun 2011.....	89
16. Logo Harian Padang Ekspres sejak Tahun 2003.....	90

DAFTAR SINGKATAN

ABRI	:	Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
AJI	:	Aliansi Jurnalis Independen
CDA	:	Critical Discourse Analyse
CEO	:	Chief Executive Owner
DPD	:	Dewan Perwakilan Daerah
DPR	:	Dewan Perwakilan Rakyat
DPRD	:	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
FIS	:	Fakultas Ilmu Ilmu Sosial
HUT	:	Hari Ulang Tahun
JK	:	Jusuf Kalla
KAMDA	:	Kampanye Daerah
KEPPRES	:	Keputusan Presiden
KMD	:	Koran Masuk Daerah
KPU	:	Komisi Pemilihan Umum
LSI	:	Lembaga Survei Independen
MALARI	:	Malapetaka Lima Belas Januari
MENPEN	:	Menteri Penerangan
MK	:	Mahkamah Konstitusi
OPP	:	Organisasi Partai Politik
ORBA	:	Orde Baru
ORLA	:	Orde Lama
PDIP	:	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
PEMILU	:	Pemilihan Umum

PO	:	Project Officer
PT	:	Perseroan Terbuka
PWI	:	Persatuan Wartawan Indonesia
RRI	:	Radio Republik Indonesia
SBY	:	Susilo Bambang Yudhoyono
SIUPP	:	Surat Izin Usaha Penerbitan Pers
SKHN	:	Surat Kabar Harian Nasional
SIT	:	Surat Izin Terbit
SPS	:	Serikat Penerbitan Surat Kabar
TVRI	:	Televisi Republik Indonesia
UU	:	Undang Undang
UNAND	:	Universitas Andalas
UNP	:	Universitas Negeri Padang
WAN	:	World Association Newspaper

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Persurat kabaran atau lazim juga disebut pers, selain berperan sebagai pengantar berita dan informasi juga berperan sebagai penyalur aspirasi masyarakat. Pers yang diinginkan masyarakat adalah pers yang mampu mengkritik kebijaksanaan pemerintah yang berkuasa, bukan pers yang hanya mampu “menjilat” pada penguasa. Untuk itu seharusnya pers diberi hak untuk bersuara secara bebas tentang peristiwa yang terjadi dalam masyarakat dan pemerintahan. Inilah yang disebut dengan pers sesungguhnya, dimana pers situ merupakan perpanjangan dan perluasan kemampuan jasmani dan rohani manusia sehingga berbagai keinginan, aspirasi, pendapat, sikap dan perasaan manusia bisa disebar luaskan melalui pers³².

Pers dan kekuasaan memiliki hubungan yang tidak dapat dipisahkan. Di Indonesia pada masa pemerintahan Orde Baru, pers di Indonesia memiliki posisi yang lemah sehingga dengan mudah ditundukkan oleh kekuasaan. Bukan rahasia lagi pada masa Orde Baru pers selalu diawasi pergerakannya melalui Badan Departemen Penerangan. Sedikit saja suatu media massa mulai memperlihatkan indikasi “membangkang” maka ancaman pembredelan pun akan dilayangkan. Inilah bentuk hubungan pers otoritarian pada masa Orde Baru.

³² Nurudin. 2004. *Sistem Komunikasi Indonesia*. Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada, hal 69.

Tuntutan akan perubahan yang begitu besar akhirnya menggulingkan Orde Baru dan melahirkan Orde Reformasi yang diharapkan akan mengembalikan makna dari pelaksanaan demokrasi yang sesungguhnya. Semua aspek kehidupan ditata ulang dengan harapan tidak akan melahirkan rezim otoriter kembali. Perubahan paling besar terjadi pada Aspek politik praktis terutama Pemilu.

Pelaksanaan Pemilu langsung ini sangat berbeda dengan yang dilaksanakan pada masa Orde Baru. Pemilu pada masa Orba hanya ditujukan untuk memilih anggota parlemen. Pada masa reformasi Pemilu juga dilaksanakan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden secara langsung serta Kepala Daerah. Pelaksanaan Pemilu ini juga menjadi momen untuk melihat bagaimana kebebasan pers dijalankan pada masa Reformasi. Pelaksanaan Pemilu pada masa Orba hanya dihiasi dengan pemberitaan yang mengangkat satu nama partai yang merupakan Partai Pemerintah. Jika ada pemberitaan yang menyudutkan partai tersebut maka media massa tersebut akan mendapat masalah atau diancam dibreidel. Banyak sekali kasus-kasus yang bisa dijadikan contoh untuk melihat bagaimana arogansi rezim Orde Baru dalam menentukan pemberitaan pada masa Pemilu. Pembreidelan itu bisa menimpa media lokal maupun media nasional.

Pada masa Orba banyak sekali kasus media massa yang dibreidel hanya karena pemberitaan yang berlawanan dengan partai rezim penguasa. Banyak media massa yang memilih jalan aman dengan tetap memberitakan semua hal

positif tentang partai penguasa termasuk juga media-media massa lokal di daerah seperti media massa Singgalang pada masa pemilu 1997³³.

Masa reformasi juga telah melahirkan banyak sekali media massa terutama media massa lokal. Banyak perusahaan percetakan besar melebarkan sayapnya dengan mendirikan banyak media massa lokal di daerah daerah. Ini menjadi suatu fenomena yang menarik terutama pada saat Pemilu berlangsung. Tidak menjadi rahasia lagi jika para taipan perusahaan percetakan raksasa tersebut adalah orang-orang yang juga tergabung secara aktif maupun secara pasif dalam beberapa Partai Politik.

Salah satu media lokal yang berdiri pada masa reformasi di Sumatera Barat adalah media massa Padang ekspres yang merupakan anak perusahaan dari perusahaan besar Jawa Pos yang didirikan oleh Dahlan Iskan yang dikabarkan “dekat” dengan sosok frontman Partai Demokrat dan pemenang Pemilu Presiden langsung pertama kali pada Pemilu 2004 yaitu Susilo Bambang Yudhoyono. Intervensi pemberitaan yang dilakukan pemerintah “mungkin” tidak terjadi lagi pada masa reformasi, tapi bagaimana jika intervensi tersebut berasal dari pihak media itu sendiri hanya karena suatu hubungan yang terjalin antara pihak media tersebut dengan pihak penguasa?

Masa pemilu menjadi masa yang sangat krusial. Semua lapisan masyarakat secara langsung ataupun tidak langsung terlibat dalam peristiwa besar ini. Perang program dan kegiatan pemenangan dilakukan dalam berbagai cara termasuk menggunakan media massa. Setiap partai politik dan para calon anggota parlemen

³³ M. Zunni, 2002, *Kecenderungan Harian Singgalang Terhadap OPP dalam Kampanye Pemilu 1992 dan Pemilu 1997*. Padang; Pustaka FIS UNP.

maupun calon Presiden dan Wakil Presiden memiliki basis-basis media massa tersendiri dalam memenangkan Pemilu.

Oleh karena itu peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian yang mencoba melihat kebebasan pers melalui pemberitaan Padang ekspres pada masa Pemilu langsung yang dilaksanakan pada tahun 2004 dan tahun 2009. Penelitian yang berjudul **“TAJUK RENCANA PADANG EKSPRES PADA PEMILU TAHUN 2004 DAN 2009 DI MASA REFORMASI”** ini mengkaji bagaimana independensi media pers Padang Ekspres melakukan pemberitaan pada saat Pemilu di daerah Sumatera Barat tahun 2004 dan 2009 dilihat dari sudut pandang Padang Ekspres sebagai salah satu media pers yang merupakan bagian dari sebuah perusahaan pers besar yang dekat dengan rezim penguasa pemenang pemilu langsung pada masa Reformasi.

B. Perumusan dan Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah: “Bagaimana bentuk pesan yang tersirat dalam Tajuk Rencana Padang Ekspres sebagai media pers pada Pemilu di Sumatera Barat pada masa Reformasi?”

Topik penelitian ini adalah mengenai *“Pers di Sumatera Barat pada masa Pemilu di masa reformasi”* dengan objek penelitiannya surat kabar Harian Padang Ekspres. Dipilihnya Padang Ekspres karena Padang Ekspres adalah salah satu media pers yang lahir pada masa Reformasi di Sumatera Barat dibawah naungan perusahaan besar Jawa Pos dan juga harian Padang Ekspres telah menjadi salah

satu harian terbesar di Sumatera Barat walaupun masih berumur sangat muda. Padang Ekspres lahir dengan membawa paradigma baru yakni paradigma media Pers Reformasi yang menjunjung tinggi kebebasan pers sebagaimana undang-undang No 40 tahun 1999 menjaminnya.

Penelitian ilmu sejarah berbeda dengan ilmu lainnya. Perbedaan tersebut terletak pada batasan temporal yang dimiliki ilmu sejarah, untuk itu di dalam penelitian ini ditetapkan batasan temporalnya yaitu tahun 1998-2009. tahun 1998 merupakan awal lahirnya Reformasi dimana kemerdekaan pers dikumandangkan oleh pemerintah yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 40 tahun 1999. Batasan akhirnya tahun 2009 merupakan tahun pelaksanaan Pemilu kedua dalam masa reformasi dimana pelaksanaan Pemilu dengan azas Luber dan Jurdil menurut beberapa kalangan sudah bisa dilaksanakan dengan baik sebagaimana harusnya dalam kehidupan berdemokrasi.

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan

Pada dasarnya penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana perkembangan media Padang Ekspres dan bagaimana Padang Ekspres menjalankan “kebebasan pers-nya” dalam Pemilu di Sumatera Barat pada masa reformasi.

Adapun Manfaat penelitian :

1. Dapat mempelajari perkembangan Media Pers Reformasi Padang Ekspres.

2. Dapat mempelajari bagaimana penerapan kebebasan pers dalam masa reformasi.
3. Sebagai bahan masukan bagi Instansi / perusahaan terkait khususnya pers di Sumatera Barat untuk tetap eksis.
4. Menambah referensi penelitian sejarah khususnya tentang sejarah pers.

D. Tinjauan Pustaka

Dari segi etimologi, pers (Indonesia) berasal dari kata *pressa* (latin) atau *press* (inggris) yang artinya tekan atau tindis. Pers dalam arti luas sama dengan media massa³⁴ di Indonesia dalam undang-undang nomor 11 tahun 1966 tentang ketentuan-ketentuan pokok pers, sebagaimana telah ditambah dengan undang-undang no 4 tahun 1967 dan diubah lagi dengan undang-undang no 21 tahun 1982. Pers adalah lembaga kemasyarakatan, alat perjuangan nasional yang mempunyai karya sebagai salah satu media komunikasi massa. Pers bersifat umum berupa penerbitan yang teratur waktu terbitnya dilengkapi atau tidak dilengkapi dengan alat-alat milik sendiri berupa percetakan alat-alat foto klise dan alat-alat teknik lainnya³⁵.

Menurut Totok Djuroto, istilah media massa terdiri dari dua kata yaitu media dan massa. Media artinya alat komunikasi sedangkan massa berarti masyarakat. Jadi pengertian media massa adalah alat komunikasi yang boleh

³⁴ Anwar Arifin.1999. *Komunikasi Politik dan pers Pancasila*. Jakarta; Media Sejahtera,hal. 15

³⁵ Totok Djuroto.2000. *Manajemen Penerbitan Pers*. Bandung; Gramedia,hal. 4

dimanfaatkan oleh semua orang. yang terdiri dari empat bentuk yaitu surat kabar, majalah, tabloid, bulletin dan buku.

Istilah pers dalam pengertian surat kabar (media cetak) asalnya dari benua eropa. Berdasarkan sejarah, ketika para pedagang disana saling bertukar informasi harga pasar yang ditulis pada kulit kayu atau kulit ternak. Pada tahun 1450, dua orang berkebangsaan belanda yang bernama Johannes Guttenberg dan Janszoon Koster menemukan huruf cetak, maka informasi itu diabadikan melalui percetakan. Surat kabar sebagai komoditi pertama kali dilakukan di Amerika Serikat ketika seorang tukang cetak berkebangsaan Inggris bernama Benyamin Harris hijrah ke Amerika Serikat pada tahun 1960. Surat kabar yang pertama kali diterbitkannya bernama “Public Occurrences Both Foreign and Domestic”³⁶.

Seiring perkembangannya pers mulai memiliki peranan yang sangat krusial dalam kehidupan bermasyarakat. Daniel Lev mengemukakan 3 peranan pers dalam masyarakat sebagai berikut³⁷;

1. Sebagai alat penerangan belaka, yaitu dimana pemerintah atau suatu golongan yang kuat dalam masyarakat bisa menjadi pengontrol pers, jadi pers berperan untuk menyiarkan cita-cita buat keperluan golongan tersebut.
2. Pers dapat dipakai sebagai alat mobilisasi oleh kalangan elite politik atau sosial untuk melahirkan nilai-nilai, mungkin nilai lama atau yang

³⁶ Daniel lev. 1971. *Peranan dan Sumbangan Pers dalam Pembangunan*. Bandung; Bina Cipta Karya, hal. 5

³⁷ *ibid*

baru. Dimana nilai tersebut akan mempersatukan masyarakat dan menggerakkan masyarakat untuk mencapai tujuan tertentu.

3. Pers itu tentunya dapat merupakan alat kontrol. Dalam fungsi yang ketiga ini jelas terlihat kompleksitas peranan pers sebagai alat pengontrol terhadap masyarakat, terhadap kaum intelektual, terhadap rakyat biasa, terhadap golongan sosial yang biasanya tidak senang dikontrol serta terhadap industri dan pers itu sendiri.

Jika dilihat dari segi lingkup wilayahnya media massa dapat dibedakan menjadi dua, yaitu media massa nasional dan media massa lokal. Menurut Andree a. Hardjana, media massa lokal dikelola oleh organisasi yang berasal dari masyarakat setempat. Ada beberapa ciri media massa lokal, yaitu sebagai berikut³⁸.

1. Isi dari media massa lokal mengacu dan menyesuaikan diri pada kebutuhan dan kepentingan masyarakat setempat.
2. Isi media massa lokal sangat mementingkan berita berbagai peristiwa, kegiatan, masalah dan persoalan atau tokoh dari masyarakat setempat.
3. Khalayak dari media massa lokal umumnya kurang bervariasi dalam struktur ataupun differensiasi sosial bila dibandingkan dengan khalayak media massa.

³⁸ Andree A. Hardjana. 1996. *Kecenderungan Budaya Masa Kini*. Jakarta; Universitas Atmadjaja, hal. 2

Para pengkaji komunikasi politik telah membahas keterkaitan antara pers dan politik dengan menggunakan dua pendekatan yaitu³⁹.

1. Pers dipandang sebagai sumber kekuasaan yang dapat mempengaruhi kehidupan politik
2. Pers memiliki ketergantungan dari kehidupan politik seperti terlihat dalam studi mengenai sistem pers dan “pembreidelan” pers.

Jamiluddin Ritonga menuliskan tentang pers Orde Baru yang lebih mengedepankan agenda kebijaksanaan. Pers yang saat itu bergelut dengan sistem politik tertutup lebih mendahulukan kepentingan pihak yang berkuasa. Hal ini sesuai dengan teori agenda setting yang mengatakan bahwa pers yang berada di negara penganut sistem politik tertutup dominan akan mengedepankan agenda kebijakan umum serta lebih dominan menyuarakan kepentingan negara khususnya eksekutif. Pers lebih banyak memberitakan kebijakan-kebijakan pemerintah termasuk kegiatan seremonial para Pejabat Pemerintah mulai dari pusat hingga lokal. Sehingga kontrol sosial yang menjadi salah satu fungsi pers menjadi tidak optimal⁴⁰. Sehingga tercipta integrasi media massa terhadap sumber kekuasaan sosial dan otoritas. Dengan demikian isi media cenderung melayani kepentingan pemegang kekuasaan politik dan ekonomi.

Pers memang menjadi sebuah kajian sejarah yang memiliki nilai menarik tersendiri sehingga pada saat ini di Indonesia sangat banyak literatur tentang pers dan sejarah pers khususnya. Beberapa diantaranya yang dapat dijadikan studi

³⁹ Anwar Arifin.1999. *Komunikasi Politik dan Pers Pancasila*. Jakarta; Media Sejahtera,hal. 15

⁴⁰ Jamiluddin Ritonga. “*kebebasan pers*”. Artikel dalam *Harian Media Indonesia*, edisi 11 mei 2000

relevan dalam penulisan skripsi ini seperti karya Dr. Abdurrahman Suryomihardjo dan tim dalam *beberapa segi perkembangan sejarah pers* di Indonesia. Karya tersebut telah membantu penulis dalam melihat dan memahami perkembangan pers secara umum di Indonesia. Berikutnya ada buku Saripudin H.A, Qyusni Hasan, Tomy Winata dalam "*Citra Media, Analisis Berita Pers Indonesia*" dan Totok Juroto, "*Manajemen Penerbitan Pers*" dimana dalam kedua buku ini penulis bisa mendapatkan informasi tentang lembaga pers dan beberapa pola perkembangan pers.

Beberapa skripsi yang penulis jadikan studi relevan diantaranya skripsi Nelti Anggreini dengan judul "*Pers Sumatera Barat Pasca Reformasi Studi Tentang Harian Padang Ekspres*" (1999-2003) yang melihat perkembangan Padang Ekspres sebagai institusi pers secara kelembagaan. Skripsi Muhammad Zunni yang berjudul "*Kecenderungan Harian Singgalang terhadap OPP dalam kampanye Pemilu 1999 & Pemilu 1997*" "suatu analisis isi" yang melihat peranan pers yakni harian Singgalang dalam kampanye pada masa orde baru. Skripsi Skripsi Eka Sri Wahyuni yang berjudul "*Pemberitaan tajuk rencana Singgalang terhadap partai politik pada kampanye 1997 dan 1999*".

Menurut UU no 40 tahun 1999, pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik dan segala jenis saluran yang tersedia.

Pers dalam pendapat beberapa ahli diartikan dalam dua bagian. Yang pertama yaitu pers dalam arti sempit hanya digolongkan sebagai produk penerbitan yang melewati proses percetakan seperti surat kabar, majalah, buletin dan sebagainya. Sedangkan Pers dalam arti luas adalah meliputi berbagai media masa baik surat kabar, majalah, radio, televisi atau film. Pers dalam pengertian sempit ataupun luas dalam kinerjanya memiliki beberapa fungsi.

Dari rumusan fungsi Pers yang termaktub dalam bab 2 pasal 2 ayat 3 Undang-undang Pokok Pers Nomor 40 tahun 1999, dapat dikembangkan fungsi Pers sebagai berikut ;

1. Memberikan Informasi
2. Mendidik
3. Menyalurkan aspirasi masyarakat
4. Membentuk pendapat umum
5. Melakukan kontrol sosial
6. Memberikan hiburan

Pertama, Pers memberikan Informasi. Fungsi utama pers adalah memberikan informasi kepada komunikannya. Pers sebagai media massa yang mengkomunikasikan pesan-pesan kepada khalayak diharapkan mampu menghimpun dan menyajikan informasi-informasi yang diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat guna menunjang pertumbuhan dan perkembangan masyarakat.

Kedua, Pers berfungsi mendidik para pembaca, pendengar atau pemirsanya. Pemberitaan melalui pers diharapkan dapat menjernihkan persoalan, menghilangkan kerisauan dan menciptakan ketenangan hidup masyarakat.

Ketiga, Pers menyalurkan aspirasi masyarakat. Aspirasi masyarakat berupa pendapat, komentar, kritik dan saran masyarakat akan ditampung dan disalurkan oleh Pers.

Keempat, Pers membentuk pendapat umum. Fungsi ini sangat penting dan tidak dapat diabaikan. Karena fungsi ini merupakan bentuk hasil dari komunikasi pers dan masyarakat.

Kelima, pers melakukan kontrol sosial. Fungsi pers yang sangat penting adalah melakukan kontrol sosial terhadap permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat dan negara. Kontrol ini sangat penting, karena pers dianggap sebagai kekuatan keempat dalam demokrasi.

Keenam, Pers memberikan hiburan. Selain fungsi-fungsi di atas, pers juga memberikan hiburan bagi pembaca, pendengar atau pemirsanya.

Dalam kehidupan pers Internasional dikenal empat cara dalam memandang dan memanfaatkan pers dalam suatu negara. Empat cara tersebut dikenal dengan empat teori pers dunia. Empat teori pers yang dikemukakan oleh *Fred.S.Siebert, Theodore Peterson* dan *Wilbur Scramm* dalam buku *Four Theories of the Press* (Empat Teori pers, alih bahasa Putu Laxman Sanjaya Pendit, 1986).

Menurut *Fred.S.Siebert, Theodore Peterson* dan *Wilbur Scramm*, empat teori pers itu adalah :

1. Teori Pers Otoritarian (Fred.S.Siebert)
2. Teori Pers Libertarian (Fred.S.Siebert)
3. Teori Pers tanggung jawab sosial (Theodore Peterso)
4. Teori Pers Soviet totalitarian /komunis (Wilbur Scram)

Di Indonesia dalam Undang-undang No.11 tahun 1966 tentang ketentuan pokok pers. Pers adalah lembaga kemasyarakatan, alat perjuangan nasional yang mempercayakannya sebagai salah satu media komunikasi yang bersifat umum berupa penerbitan yang teratur waktu terbitnya, dilengkapi atau tidak dilengkapi dengan alat-alat milik sendiri berupa percetakan, alat-alat foto, klise, dan alat-alat teknik lainnya.

Organisasi Pers di Indonesia dinyatakan dalam undang-undang Nomor 21 tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok Pers pasal 1 ayat 5. Pasal ini berbunyi : “Organisasi Pers adalah organisasi wartawan, organisasi perusahaan pers, organisasi grafika pers, dan organisasi media periklanan yang disetujui pemerintah”. Namun dalam undang-undang Pers Nomor 40 Tahun 1999, secara eksplisit hanya dinyatakan dua organisasi Pers. Pada pasal 1 ayat 5 berbunyi : Organisasi Pers adalah organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers. Pada pasal 1 ayat 2 pers meliputi perusahaan media cetak, media elektronik, dan kantor berita, serta perusahaan media lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan, atau menyalurkan informasi.

Organisasi wartawan dalam dunia pers nasional adalah organisasi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dan beberapa organisasi sejenis lainnya dan

organisasi perusahaan pers adalah Serikat Penerbitan Surat Kabar (SPS) serta beberapa organisasi sejenis lainnya. Perusahaan pers adalah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers meliputi perusahaan media cetak, media elektronik, dan kantor berita serta perusahaan media lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan atau menyalurkan informasi.

Sejarah pers membuktikan bahwa pers yang dapat tumbuh dan berkembang adalah pers yang dapat memadukan antara independensinya, idealisme dan bisnis. Begitu juga pers dalam kehidupan politik. Politik yang identik dengan kekuasaan dalam demokrasi merupakan suatu konsep yang selalu berkembang untuk menemukan konsep yang ideal diterapkan dalam suatu negara. Politik tidak bisa dikuasai hanya oleh satu orang ataupun satu kelompok akan tetapi dalam demokrasi politik adalah milik semua warga negara dan salah satu bentuk aplikasinya adalah dalam pelaksanaan Pemilu.

Pelaksanaan Pemilu 2004 dipandang sebagai Pemilu yang paling demokratis dalam sejarah Indonesia karena rakyat Indonesia melakukan pemilihan langsung dalam memilih Presiden dan Wakil Presiden. Dan sistem ini dilanjutkan dengan Pemilu yang dilaksanakan pada tahun 2009. Pelaksanaan Pemilu dengan perubahan yang revolusioner ini yang diimbangi dengan kebebasan pers juga mempengaruhi peta politik dan pelaksanaan Pemilu di daerah.

Di daerah Sumatera Barat, daerah yang dikenal sebagai lumbung intelektual sebelum masa PRRI pengetahuan tentang politik sebenarnya sudah dibangun dengan cukup memadai. Politik bagi orang Sumatera Barat dibicarakan sehari-hari di tempat-tempat yang tidak saja formal, tetapi juga informal seperti

pangkalan ojek, pasar, lapau, surau, dan bahkan tempat-tempat pekerjaan tertentu seperti di kebun atau sawah, balai desa/nagari, saat arisan, dan perkantoran bagi masyarakat perkotaan. Politik bukanlah barang mewah yang hanya dimiliki dikuasai, didominasi oleh kalangan elite (para politisi) saja. Masyarakat Sumatera Barat pada umumnya sangat dekat dan relatif paham, serta punya cara tersendiri dalam memberikan penilaian terhadap proses politik yang sedang berlangsung.

Tetapi tak bisa dipungkiri pengetahuan politik orang Sumatera Barat tak bisa dilepaskan dari pengaruh dan perkembangan pers di Sumatera Barat. Seperti yang diutarakan sebelumnya. Sejarah pers di Sumatera Barat sudah berlangsung dari zaman Kolonial Belanda. Setelah reformasi, pers di Sumatera Barat berkembang lebih pesat lagi, ini dibuktikan dengan banyaknya surat kabar baru yang terbit pada masa reformasi. Namun ada hal menarik dalam mengkaji keterkaitan antara pers dan kegiatan politik terutama dalam melihat saat Pemilu pada masa reformasi. Yaitu melihat bagaimana pers menjalankan independensinya saat Pemilu berlangsung terutama pers yang digolongkan sebagai pers reformasi seperti Padang Ekspres.

Dalam konteks inilah, skripsi ini diajukan dengan judul : **“TAJUK RENCANA PADANG EKSPRES PADA PEMILU TAHUN 2004 DAN 2009 DI MASA REFORMASI”** Penelitian dalam skripsi ini mengkaji bagaimana harian Padang Ekspres mewujudkan independensinya sebagai media pers melalui pemberitaan pada segmen tajuk rencana dalam Pemilu tahun 2004 dan 2009 pada masa Reformasi.

E. Metode Penelitian

Penelitian ini disusun berdasarkan tahapan-tahapan yang ada dalam metode sejarah, adapun tahapan yang dilakukan adalah Heuristik (Pengumpulan data), Kritik sumber (Pengujian), analisis, sintesis dan interpretasi⁴¹.

Tahap pertama, heuristik yaitu mengumpulkan informasi yang relevan atau berhubungan dengan penelitian⁴², pengumpulan dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi lapangan. Studi kepustakaan sebagian dilakukan di kantor Padang Ekspres, Perpustakaan pusat UNP, perpustakaan FIS, perpustakaan Jurusan Sejarah, perpustakaan UNAND. Adapun yang dicari adalah buku-buku yang memiliki relevansi dengan penelitian ini dan karya sejarah mahasiswa yang menulis perkembangan Pers di Sumatera Barat.

Dalam studi lapangan wawancara dilakukan dengan sejumlah tokoh seperti St. Zailil Asri, Pemimpin Umum/Penanggung Jawab surat kabar Harian Padang Ekspres, Pemimpin Redaksi harian Padang Ekspres, karyawan dan wartawan Harian Padang Ekspres. Untuk Komparasi data, Penulis juga meakukan wawancara dengan agen, looper, dan pembaca Harian Padang Ekspres dan untuk perbandingan data-data yang diperoleh, dilakukan wawancara dengan beberapa orang wartawan senior di Sumatera Barat, pengurus organisasi pers seperti dari PWI (persatuan Wartawan Indonesia) Sumatera Barat dan AJI (Aliansi Jurnalis Independen) Kota Padang. Serta dengan beberapa fungsionaris partai politik di Sumatera Barat dan Kalangan calon legislatif pada Pemilu 2004 dan 2009.

⁴¹ Louis Gortschalk. 1997. *Mengerti Sejarah*. Jakarta; YP UI, hal. 32

⁴² Mestika Zed. 1999. *Metodologi Sejarah*. Padang; FIS UNP, hal. 36

Tahap Kedua, Kritik Sumber yaitu penyeleksian data yang dikumpulkan yaitu data-data arsip, transkrip wawancara dan kepustakaan. Selanjutnya dilakukan *Kritik sumber eksteren dan interen*. Kritik sumber eksteren dilakukan untuk menguji keaslian atau otensitas material data yang dikumpulkan khususnya terhadap arsip dan dokumen, dengan melihat jenis kertas, tinta yang dikeluarkan, jenis huruf /tulisan. Sedangkan Kritik Interen dilakukan terhadap dokumen/arsip guna menguji keabsahan (reabilitas) isi yang terdapat di dalamnya. Untuk data yang diperoleh melalui wawancara kritik Interen dilakukan dengan cara Cross Check yaitu mengajukan pertanyaan yang sama pada orang yang berbeda atau pada orang yang sama tetapi waktunya berbeda, serta membandingkan hasil wawancara dengan data tertulis yang telah ada⁴³.

Data-data yang telah diseleksi/dikritik pada langkah selanjutnya dilakukan Analisis, Sintesis dan Interpretasi. Analisis yang peneliti lakukan menggunakan pendekatan yang berasal dari ilmu sastra (bahasa). Sehubungan dengan penelitian ini peneliti akan menggunakan pendekatan CDA (Critical Discourse Analysis) atau Analisis Wacana Kritis. Metode analisis wacana kritis merupakan salah satu pendekatan dalam analisis wacana yang menekankan kepada konstelasi kekuatan yang terjadi pada proses produksi dan reproduksi makna. Bahasa tidak dipahami sebagai medium netral yang terletak diluar diri si pembicara. Bahasa dipahami sebagai representasi yang berperan dalam membentuk subyek tertentu, tema-tema wacana tertentu maupun strategi-strategi didalamnya.

⁴³ Willa K. Baum.1997. "*Transcribing and Editing Oral History*", *American Association for State and Local History*, dalam Siti Fatimah, 2004. "*Negara dan Perempuan: Fujinkai (1943-1945) dan Dharma Wanita (1974-1999)*". Disertasi. Jakarta; Program Pasca Sarjana Ilmu Pengetahuan dan Budaya, UI.

Analisis wacana dipakai untuk membongkar kuasa yang ada dalam setiap proses bahasa. Batasan-batasan apa yang diperkenankan menjadi wacana, perspektif yang mesti dipakai, topik apa yang dibicarakan. Wacana melihat bahasa selalu terlibat dalam hub kekuasaan, karena memakai perspektif kritis, analisis wacana kategori ini disebut juga dengan analisis wacana kritis.

Pada level analisis teks, dipakai metode analisis teks eklektif⁴⁴, analisis ini akan menghasilkan suatu deskripsi mengenai isi berita. Pada level analisis proses, dilakukan wawancara dengan beberapa orang pengelola media sebagai sampel penelitian, yang berguna untuk melakukan penafsiran (interpretasi) atas pemberitaan. Terakhir pada level analisa sosial, dilakukan penelusuran kepustakaan yang berkaitan dengan keadaan sosial yang mempengaruhi proses pembuatan berita dan menjelaskan (*eksplanasi*) lahirnya pemberitaan tersebut⁴⁵.

Pemakaian metode di atas bertujuan untuk mengelompokkan data yang ada sesuai dengan permasalahan penelitian dan dilanjutkan dengan menerangkan/menginterpertasikan sehingga diperoleh gambaran umum permasalahan yang diteliti.

Setelah itu baru dilakukan langkah terakhir yaitu penulisan hasil penelitian dalam bentuk karya ilmiah (*Skripsi*) secara logis dan sistematis terhadap data yang diperoleh secara menyeluruh dengan judul : **“TAJUK RENCANA PADANG EKSPRES PADA PEMILU TAHUN 2004 DAN 2009 DI MASA REFORMASI”**

⁴⁴ Ibnu Hammad. 2004. *Konstruksi Realitas Politik dalam Media Massa*. Jakarta;Granit,hal. 35

⁴⁵ Ibnu Hammad,*Op Cit*. Hal. 108

F. Sistematika Penulisan

Penelitian yang nanti akan dilakukan akan disajikan dalam empat bab. Bab I (*Pendahuluan*) berisi latar belakang masalah, perumusan dan pembatasan masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sumber dan sistematika penulisan

Bab II menyinggung tentang perkembangan pers di Sumatera Barat pada era Orde Baru dan pasca Reformasi serta melihat bagaimana sejarah lahir dan hubungan Padang Ekspres dengan Kelompok Jawa Pos.

Pada Bab III membahas bagaimana pemberitaan Padang Ekspres dalam segmen Tajuk Rencana pada Pemilu 2004 dan 2009 melalui pendekatan menggunakan metode CDA dan Tes Eklektif.

Bab IV merupakan kesimpulan. Bab IV sebagai bab akhir dimana diharapkan terdapat benang merah dari semua penjelasan yang ada.